

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Giiran Wali Kota Tasikmalaya, KPK Dalam Dugaan Gratifikasi
Entitas / Cakupan	: Kota Tasikmalaya
Sumber / Hal	: Galamedia/Hal. 6
Edisi	: Rabu, 28 November 2018

Giliran Wali Kota Tasikmalaya

KPK Dalam Dugaan Gratifikasi

TASIKMALAYA, (GM).-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, terkait pemberian gratifikasi berupa uang kepada Yaya Purnomo, eks Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

Budi diduga memberikan gratifikasi uang ratusan juta rupiah, guna memuluskan penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah ke wilayahnya.

Peran Budi disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut KPK terhadap Yaya. "Pihak-pihak lain yang disebut di dakwaan dan fakta sidang, tentu kami cermati peran-perannya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya yang dikutip *pikiran rakyat online*, Selasa, (27/11).

Hal senada telah diungkapkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. "Akan (di)pelajari oleh penyidik," ujar Basaria terkait pengusutan pemberian fulus oleh Budi.

Jejak Budi memang terkuak dalam pembacaan surat dakwaan KPK terhadap Yaya Purnomo di Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, (27/9). Dalam surat dakwaan tersebut, Budi disebut memberikan uang senilai total Rp 700 juta kepada Yaya, untuk mengurus pengucuran DAK dan DID APBN Tahun Anggaran 2018 untuk Kota Tasikmalaya.

Awalnya, Pemkot mengajukan proposal usulan DAK reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana tahun anggaran 2018 untuk tujuh kegiatan dengan total nilai Rp 32.883.725.000,00. Usulan tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat melalui surat Wali Kota Tasikmalaya.

Setelah pengajuan usul, Budi bertemu dengan Yaya dan Rifa Surya di Lobi Hotel Arya Duta sekitar Agustus 2017. Rifa adalah Kepala Seksi Perencanaan DAK Fisik II Dirjen Perimbangan Kemenkeu. Budi meminta bantuan Yaya dan Rifa perihal peningkatan DAK 2018.

"Atas permintaan tersebut, terdakwa (Yaya) dan Rifa yang mengetahui terlebih dahulu adanya alokasi dana perimbangan untuk daerah, menyampaikan adanya dana perimbangan yang bisa dialokasikan di tahun anggaran 2018," tulis surat dakwaan itu.

Mereka pun berjanji akan memprioritaskan dana tersebut untuk

Pemkot Tasikmalaya. Setelah adanya komitmen pemberian Dana Insentif Daerah kepada Kota Tasikmalaya, Budi memberikan uang senilai Rp 200 juta yang kemudian dibagi Yaya dengan Rifa masing-masing Rp 100 juta.

Enggan komentar

Sementara itu, Wali Kota Budi Budiman, cenderung enggan mengomentari terkait masuknya nama dirinya dalam dakwaan Yaya Purnomo oleh Jaksa KPK tersebut.

"Oh nantilah," kata Budi singkat, selepas menghadiri pelantikan Pengurus Cabang (PCNU) Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya di Gedung PCNU Kota Tasikmalaya serta peresmian BMT NU dan Kios Modern NU (KIMONU) di Jalan Dr Sukarjo, Selasa, (27/11).

Padahal, sebelumnya Budi menjawab panjang lebar pertanyaan wartawan terkait upaya peningkatan usaha kecil dan usaha syariah di Kota Tasikmalaya.

Ketika kembali diminta konfirmasi dan klarifikasi selepas Budi meninggalkan acara, Budi enggan berkomentar. Kembali jawaban serupa dilontarkannya.

"Ah nantilah dululah," ujar Budi sembari bergegas menuju mobil. Dia hanya menyatakan mengikuti proses saja. **(B.35)****